

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Hubungan Internasional

Hubungan Internasional adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang Negara dan hubungan antar Negara, termasuk peran dari setiap Negara, organisasi antar pemerintah, organisasi non pemerintah Internasional, organisasi non pemerintah, dan perusahaan multinasional.

Istilah Hubungan Internasional memiliki beberapa arti.

1. Suatu bidang spesialisasi yang meliputi aspek-aspek internasional dari beberapa cabang ilmu pengetahuan
2. Sejarah baru dari politik Internasional
3. Semua aspek internasional dari kehidupan sosial manusia, dalam arti: semua tingkah laku manusia yang terjadi atau yang bermula di suatu negara dan dapat mempengaruhi tingkah laku di negara lain
4. Suatu cabang ilmu yang berdiri sendiri (Darmayadi, 2015: 22).

Hubungan Internasional menurut Charles McClelland adalah studi tentang interaksi antara jenis-jenis kesatuan sosial tertentu, termasuk studi yang berkaitan dengan keadaan-keadaan yang relevan yang mengelilingi interaksi. Hubungan Internasional berkaitan dengan segala bentuk interaksi antara masyarakat, negara-negara, baik yang dilakukan oleh pemerintah ataupun warga negara (Perwita &

Yani, 2005:4). Seymond Brown mendefinisikan Hubungan Internasional sebagai aksi dan reaksi dari negara-negara yang berdaulat dan diwakilkan oleh para pejabat yang berkuasa di negara-negara tersebut. Selanjutnya Hubungan Internasional juga diartikan sebagai *struggle for power among nations* (perjuangan untuk kekuasaan oleh bangsa-bangsa) oleh Hans Morgenthau (Bakry, 2017:2).

Hubungan Internasional seringkali dianggap sebagai cabang dari ilmu politik, tetapi Hubungan Internasional juga membahas tentang sejarah, ekonomi, hukum internasional dan filsafat (Jackson & Sorensen, 2016:4). Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani dalam bukunya menjelaskan bahwa tujuan utama dalam studi Hubungan Internasional yaitu mempelajari perilaku internasional yaitu perilaku aktor dalam hubungan internasional. Perilaku atau interaksi ini dapat berupa kerjasama (*cooperation*), persaingan (*competition*), pertentangan (*conflict*), pembentukan aliansi hingga interaksi dalam sebuah organisasi internasional.

Hubungan Internasional yang pada awal mulanya hanya mengkaji tentang perang dan damai kemudian diperluas bentuk kajiannya, menjadi kajian Hubungan Internasional yang tidak hanya fokus terhadap hubungan politik antar Negara akan tetapi mencakup juga peran dan kegiatan yang dilakukan oleh aktor – aktor bukan Negara, hal inilah yang disebut dengan Hubungan Internasional kontemporer (Rudy, 2003 : 51).

Hubungan Internasional adalah hubungan antar Negara – Negara yang ada di belahan dunia dimana di dalam Hubungan Internasional itu sendiri terdapat

komponen - komponen yang mempengaruhi kerja dari Hubungan Internasional sendiri yakni dengan adanya analisis tentang perbandingan politik luar negeri negara, hukum internasional, organisasi - organisasi internasional, perbandingan politik dan studi kawasan (area studies), studi - studi strategis (strategis studies), pembangunan internasional, komunikasi internasional, dan studi perdamaian serta upaya penyelesaian konflik termasuk yang menyangkut pengendalian dan pelucutan senjata.

Hubungan internasional dapat dilihat dari berkurangnya peran negara sebagai aktor dalam politik dunia dan ditambahkan dengan meningkatnya peranan aktor non negara. Batas-batas yang memisahkan antar negara semakin kabur dan tidak relevan. Bagi beberapa aktor non negara bahkan batas-batas wilayah secara geografis tidak dihiraukan (Perwita & Yani, 2005: 4).

2.1.2 Kerjasama Internasional

Dalam melaksanakan hubungan internasional terdapat beberapa interaksi antar negara-negara, ada berbagai macam bentuk interaksi antar negara tersebut, bisa berbentuk perang konflik, kerjasama dalam organisasi internasional (Mas'ood, 1990). Kerjasama Internasional adalah salah satu dari bentuk interaksi antar aktor hubungan internasional dimana didalamnya terdapat kepentingan masing-masing negara atau bisa dikatakan juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Kerjasama Internasional meliputi kerjasama di bidang politik, social, pertahanan, keamanan, kebudayaan, dan ekonomi, berpedoman pada politik luar negeri masing-masing. (Ikbar, 2014: 273).

Menurut K. J. Holsti, kerjasama internasional dapat didefinisikan sebagai berikut (Holsti, 1998):

- a) Pandangan bahwa ada lebih dari satu kepentingan bisa dua bahkan lebih, tujuan untuk saling bertemu dan dapat menghasilkan sesuatu dari pertemuan tersebut.
- b) Harapan dari suatu negara bahwa kebijakan yang diputuskan oleh negara lainnya akan membantu negara itu untuk mencapai kepentingannya.
- c) Persetujuan atau masalah tertentu antar dua negara atau lebih dalam rangka memanfaatkan persamaan kepentingan yang dimiliki, namun bisa juga berbenturan kepentingan yang tidak sejalan.
- d) Aturan resmi atau non resmi tentang transaksi dimasa depan yang dilakukan untuk melaksanakan suatu persetujuan.
- e) Transaksi antar negara untuk memenuhi suatu persetujuan negara mereka.

2.1.3 Soft Power Diplomacy dan Propaganda

Konsep *power* atau kekuasaan ialah kepentingan nasional yang harus dikejar oleh suatu negara. Walaupun sring membingungkan karena cakupannya yang begitu luas dan memiliki banyak makna. Akan tetapi *power* tetap menjadi ukuran bagi analisis realis. *Power* sering dipertukarkan dengan konsep pengaruh,

kekuasaan, kekuatan senjata, pertimbangan kekuasaan, kekuatan lunak (*soft power*) dan berbagai istilah lainnya (Triwahyuni, 2018: 34).

Soft power berbeda dengan hard power, yang dimana atribut dasarnya bukan pemaksaan fisik, di mana metode manipulasi fisik digunakan untuk mengubah perilaku aktor lain. Di pihak lain, pihak yang disebutkan menggunakan cara-cara non-fisik untuk mempengaruhi aktor lain (Rothman 2011: 51). Rothman kemudian menjelaskan bahwa bentuk-bentuk kekuasaan ekonomi “mempengaruhi kemampuan suatu negara untuk bertahan hidup dalam sistem internasional atau untuk mempertahankan kekuasaan sebagai pemimpin”, hal itu membuktikan bahwa kekuatan militer, kekuatan ekonomi telah lama menjadi bagian dari bahan diskusi mengenai kekuasaan dalam hubungan internasional (2011). Kim dan Marinescu, mengatakan bahwa dalam penelitian sosial dan budaya, istilah soft power digunakan secara bergantian dengan ‘pengaruh budaya’ (2015). Konsep milik Joseph Nye tentang soft power — “kemampuan mempengaruhi perilaku orang lain untuk mendapatkan hasil yang diinginkan” (2004) — kalimat tersebut telah digunakan sebagai definisi standar dalam berbagai studi hubungan internasional. Nye kemudian menjelaskan bahwa soft power “timbul dari daya tarik kebudayaan, cita-cita politik, dan kebijakan suatu negara” Ketika kebijakan kita sah di mata orang lain, maka soft power kita ditingkatkan” (2004). Rothman menambahkan catatan tentang legitimasi dalam studinya dengan menyatakan bahwa “kredibilitas adalah salah satu sumber daya soft power yang terpenting” (2004).

Soft power juga dapat digunakan sebagai strategi propaganda oleh pemerintah, mereka ingin memastikan bahwa penyebaran budaya dan ideologis terjadi dalam skala global, dengan demikian berperan sebagai *Korean Wave* (Korea selatan atau ROK), karena soft power dan propaganda berkaitan dengan budaya populer (Jang 2018: 1). Cara kerja propaganda ialah “diciptakan untuk menyampaikan pesan, soft power adalah produk sampingan dari ekspresi kreatif” (Elliot 2010, sebagaimana dikutip dalam Jang 2018: 3) salah satu contohnya Korea selatan yang dimana menggunakan strategi soft power dalam bentuk kebijakan Sunshine, sebagaimana diamati dari tahun 1998 hingga 2008, Korea selatan bertujuan untuk melemahkan Korea utara melalui bantuan ekonomi dan interaksi (Jang 2018: 2).

Meskipun perbedaan propaganda dan soft power telah dibentuk dalam studi Jang - dengan bagaimana negara tidak selalu melibatkan diri dalam penggunaan budaya sebagai soft power, tetapi lebih banyak digunakan sebagai sarana untuk propaganda yang dapat melawan karakteristik soft power (Kondo 2008; Melissen 2005; Elliot 2010). Dalam kasus Korea Selatan, negara telah terlibat dalam produksi dan penyebaran budaya populer. Pemerintah bahkan menggunakan *Hallyu* sebagai soft power yang akan fokus pada cap nasional dan ekspor budaya, yang pada akhirnya akan membangun dirinya dan memperkuat posisinya di dunia (Kalinowski dan Cho 2012, di Jang 2018).

Korea Selatan juga menggunakan pengalaman historis mereka tentang kolonisasi dan pertukaran budaya untuk berhubungan dengan negara-negara lain yang memiliki jenis sejarah yang sama. Mereka melihat ini sebagai kesempatan

untuk mengatasi budaya mereka yang tersisihkan, jika sudah teratasi, produk budaya Korea akan menjadi lebih menarik bagi orang asing. Dalam semua strategi yang berkaitan dengan ekspansi jangkauan *Hallyu*, pemerintah Korea telah memastikan bahwa budaya Korea akan digunakan dalam globalisasi Korea Selatan, dan pada saat yang sama, akan ada globalisasi “Korea Selatan” (Kim dan Marinescu 2015: 2).

2.1.4 Diplomasi Publik, Budaya, dan Digital

Menurut Joseph Nye, soft power dan diplomasi publik telah membentuk kesusastran dan praktik di bidang ini, karena diplomasi publik dipandang sebagai salah satu instrumen utama dari soft power (2004). Diplomasi publik, menurut the SAGE Handbook of diplomasi, “memusatkan komunikasi diplomatik antara entitas politik dan orang yang biasanya berada di negara asing” (Huijgh 2016: 437). Keterlibatan diplomatik semacam ini pada dasarnya dipengaruhi oleh demokrasi, globalisasi, dan revolusi komunikasi, dan juga akan ada yang mempengaruhi perubahan-perubahan ini.

Istilah “diplomasi publik” juga dikatakan muncul untuk menunjukkan hubungan antara “program informasi internasional dan budaya” dengan kebijakan luar negeri. Istilah itu digunakan sebagai pengganti istilah “propaganda”, karena hal ini dipahami sebagai manipulasi perilaku dan kesadaran masyarakat untuk menyelaraskan diri dengan propagandists (Auerbach dan Castronovo 2013). Edmund A. Guillon dari universitas Tufts Fletcher School mendefinisikan

diplomasi publik sebagai “ arus informasi dan gagasan transnasional” (1965). Debat mengenai arti istilah ini, berarti perlunya kebijakan pemerintah untuk publik atau menonjolkan citra negara di luar negeri (Roberts 2007: 36).

Penting juga untuk diperhatikan bahwa sebagian besar penelitian tentang diplomasi publik berfokus pada amerika serikat, karena konon dari sinilah istilah ini berasal. Uni eropa juga menggunakan soft power untuk menangani kedua hubungan internasionalnya dan mengatasi konflik dalam organisasi (Landaburu 2006; Tata krama 2002). Minat terhadap soft power dan diplomasi publik di Asia (Huijgh 2016: 441), khususnya di Asia timur. Akan tetapi, sebagian besar riset berfokus pada strategi ringan kekuasaan jepang dan tiongkok, dan hanya beberapa yang telah mempelajari strategi soft power Korea selatan.

Peran kedua aktor negara dan aktor non-negara dalam diplomasi publik telah dipelajari. Literatur mengungkapkan bahwa kehadiran dan peran aktor non-negara-aktor keagamaan, Sub-negara aktor, Organisasi Internasional, multinasional, dan swadaya masyarakat, Perusahaan multinasional, dan orang-orang yang telah mempertanyakan tradisi diplomasi, yang mencakup legitimasi struktur, metode, dan teknik yang ada di negara-negara itu sendiri (Bieler 2000; Pengiriman dan Neumann 2006; Hocking 2012). Dengan ini, pemerintah mulai mempertimbangkan aktor non-negara sebagai aktor diplomatik dan telah melibatkan mereka dalam konsultasi dan telah membentuk kemitraan dengan partai-partai tersebut.

Beberapa hubungan antara diplomasi digital, diplomasi budaya, diplomasi selebritis juga telah dibuat, khususnya dengan bagaimana hal ini telah membantu diplomasi publik.

Diplomasi Digital dikatakan disebabkan oleh revolusi Internet yang berdampak pada isu hubungan internasional (Adesina 2017: 1). Istilah diplomasi Digital juga telah digunakan secara interchangeably dengan e-diplomasi (Hocking, DLL. Al. 2012), cyber (Barston 2014), diplomasi (Harris 2013), atau twiplomacy (Sandre 2012, di Adesina 2017). Penggunaan platform media sosial untuk meneruskan tujuan kebijakan luar negeri (Manor dan Segev 2015) hingga para diplomat menggunakan alat komunikasi digital untuk terhubung dengan publik (Lewis 2014), menggunakan Internet dan teknologi komunikasi informasi lainnya (ICTs) dalam melaksanakan tujuan diplomatik (Hanson 2012, di Adesina 2017), Dan untuk “penggunaan sumber daya diplomatik dan pelaksanaan fungsi diplomatik untuk mengamankan kepentingan nasional yang berhubungan dengan dunia maya” (Barrinha dan Renard 2017).

Berdasarkan definisi ini, faktor-faktor penting yang tercakup dalam definisi kerja diplomasi digital untuk penelitian ini adalah penggunaan media digital terhadap tujuan diplomatik. Oleh karena itu, pemanfaatan praktis penerapan digital dalam diplomasi publik dapat dianggap sebagai diplomasi digital yang memanfaatkan diplomatis digital sebagai alat atau alat untuk diplomasi publik.

Penelitian tentang diplomasi digital masih memiliki potensi ketika eksplorasi lebih lanjut berfokus pada aplikasi ICTs yang belum dilakukan. Selain itu, teori ini masih terus terhubung dengan praktek (Barrinha dan Renard 2017). Literatur yang ada juga masih kekurangan kerangka kerja konseptual yang dapat digunakan untuk menilai efektivitas penggunaan media sosial untuk tujuan diplomatik publik (Bjola dan Jiang 2015). Selain itu, mengingat faktor umum dalam definisi hanya akan menunjuk penggunaan ICTs untuk melaksanakan tujuan-tujuan diplomatik, dan tidak semua definisi akan membatasi penggunaan itu kepada diplomat pemerintah, akan menarik untuk mengeksplorasi bagaimana aktor non-negara memanfaatkan diplomasi digital juga.

Sebaliknya, curahan tentang diplomasi kebudayaan telah didominasi oleh istilah-istilah soft power dan diplomasi publik, dan istilah-istilah ini telah digunakan sebagai istilah standar dalam pembahasan pemikiran kebijakan luar negeri. Diplomasi budaya secara luas didefinisikan sebagai “praktek apa pun yang berkaitan dengan kerja sama budaya yang bertujuan antara bangsa atau kelompok bangsa” (Ang, DLL. Al. 2018: 366). Amdt, sebagaimana disebutkan dalam artikel itu, juga telah membedakan diplomasi budaya dari hubungan budaya, karena yang pertama dikatakan hanya terjadi ketika para diplomat menggunakan aliran budaya untuk memajukan kepentingan nasional, sedangkan yang kedua memungkinkan pertumbuhan alami dan penyebaran kebudayaan, tanpa campur tangan pemerintah (Ang, DLL. Al. 2018: 366).

Clarke (2014) menyebutkan bahwa pertukaran budaya internasional terjadi dengan pengawasan minimal negara karena merupakan pasar budaya global yang

memfasilitasi itu, sebagaimana ditunjukkan dengan contoh dari budaya manga jepang atau anime. Akan tetapi, karena fasilitas-fasilitas itu tidak dikendalikan oleh negara, negara mungkin tidak memiliki pemahaman yang jelas mengenai bagaimana reaksi terhadap pasar budaya mereka dapat digunakan untuk membentuk atau mempengaruhi hasil dari keuntungan mereka. Clarke percaya itu karena negara-negara hanya memperhatikan popularitasnya tapi tidak memperhatikan makna yang diciptakan penonton berdasarkan konteks mereka sendiri.

Schneider, dalam artikelnya, membahas program diplomasi budaya yang diadakan oleh amerika serikat dan mengamati bahwa program dan pertukaran ini “meningkatkan pemahaman, menghancurkan stereotip, dan mengubah cara orang memandang satu sama lain, yang pada akhirnya dapat menuntun pada perubahan cara pemerintahan berinteraksi” (2009: 276).

2.1.5 Diplomasi Selebriti

Dalam beberapa tahun terakhir, perhatian telah diberikan pada aspek informal politik dan kekuasaan. Dengan kurangnya pembahasan tentang aktor non-negara dan transformasi diplomasi. Politik informal ialah kegiatan interpersonal yang lahir dari jalinan sikap politik yang diterima secara diam-diam di luar kerangka kerja pemerintah, konstitusi, birokrasi, dan lembaga-lembaga serupa menambah definisi dan berpendapat bahwa politik informal mencakup

penggunaan sarana yang tidak sah (meskipun tidak selalu ilegal) untuk mengejar kepentingan umum (Pike:2000)

Diplomasi selebriti telah diartikan sebagai pekerjaan dari individu atau suatu kelompok yang terkenal, sehingga mereka bisa mempublikasikan tujuan internasional dan terlibat dalam pengambilan keputusan kebijakan luar negeri yang biasanya diurus oleh aktor negara (Wheeler 2016: 530). Para selebriti mengambil peran aktif dalam menyarankan suatu tindakan atau mengambil suatu kebijakan tertentu yang berkaitan dengan urusan luar negeri dan menyajikannya kepada publik. Hal ini dianggap sebagai 'creep mission', di mana para selebriti memperluas peran dan tujuan mereka melampaui yang seharusnya ditugaskan pada mereka (Choi dan Berger, 2009; Hyde, 2009, di Choi dan Berger 2010). Jenis keterlibatan diplomatik ini digunakan oleh organisasi-organisasi pemerintah internasional (IGOs) seperti perserikatan bangsa-bangsa (PBB), dan organisasi-organisasi non-pemerintah (LSM) seperti palang merah, Oxfam, dan UNICEF. Para selebriti dilantik sebagai duta kebaikan PBB atau utusan perdamaian, sementara LSM diwakili oleh para selebriti ini.

Telah diamati bahwa telah terjadi peningkatan aktifisme selebriti dalam dunia politik hubungan internasional, karena alasan-alasan berikut:

1. Merosotnya keefektifan politik (Wheeler 2011)
2. Meningkatnya penggunaan internet dan teknologi seluler (Choi dan Berger 2010) dan situs-situs jaringan sosial, seperti Twitter dan Facebook (Stieglitz dan Dan-Xuan 2012).

Dengan diplomasi selebriti melampaui isu-isu yang sedang berkembang, hal tersebut memunculkan bentuk-bentuk keterlibatan baru. Seperti telah mendorong perubahan dalam hubungan internasional tradisional. Jika diplomasi publik sudah menyatu dengan berbagai versi hak pilihan yang lebih terbuka, maka bentuk-bentuk diplomasi suatu negara yang sudah tradisional akan perlahan menghilang (Cooper 2008).

Peran para selebriti saat berdiplomasi ialah menciptakan bidang diplomasi selebritis yang dimana telah dipelajari secara luas sebelum ditugaskan. Para selebriti telah melampaui ekspektasi tradisional, mereka melibatkan diri di dalam diplomasi internasional (Choi dan Berger 2010). Para aktivis yang telah berganti menjadi selebriti telah mengalihkan fokus dari diplomasi tradisional yang diarahkan oleh suatu negara, dan telah membawa lebih banyak perhatian pada hal yang berhubungan dengan masalah nasional dan solidaritas bersama, penyebab yang sah dan nilai-nilai global (Cooper, Dobson, dan Wheeler 2017; Huliara dan Tzifakis 2010).

Para selebriti telah menjadi aktor penting dalam diskusi tentang pembangunan dengan mempublikkan suatu kampanye, selebriti dapat mempengaruhi opini publik dan ikut campur dalam urusan diplomatik, tetapi bertentangan dengan laporan pers, para selebriti tidak boleh terlalu mempengaruhi hasil kebijakan suatu negara. Ini karena tidak ada kesadaran secara otomatis dalam menyamakan tindakan dari pemerintah yang terlibat (Dieter dan Kumar 2008; Cooper 2008, Wheeler 2011; Huliara dan Tzifakis 2010).

Akan tetapi, terlepas dari meningkatnya kehadiran mereka dalam dunia politik, para selebriti ini tidak memiliki kekuasaan, karena kebanyakan dari mereka mengangkat diri secara pribadi bukan atas keputusan resmi dari negara. Keunggulan mereka di lapangan adalah memiliki kharisma dan kekayaan hingga kredibilitas pribadi mereka sebagai selebriti akan memberikan dampak yang cukup signifikan. Mengingat hal ini, mereka menggunakan dukungan masyarakat melalui penggunaan media massa untuk mempengaruhi opini public (sudut 2003; Wheeler 2011).

Sudah menjadi hal yang biasa bahwa masyarakat menganggap para selebriti berkaitan dengan politik, karena mereka dalam kasus yang menarik, berbicara dengan fasih, dan berbicara dengan penuh semangat. Lalu kriteria adalah salah satu hal yang warga gunakan untuk mengevaluasi para politisi mereka, sehingga tidak mengejutkan melihat peningkatan jumlah selebriti yang terpilih untuk jabatan publik (Kogen 2014: 39).

Contoh tentang para selebriti yang aktif dalam diplomasi selebriti mencakup:

1. George Clooney, yang berkampanye menentang kehadiran dan kejahatan yang dilakukan oleh milisi pemerintah sudan.
2. Jessica Lange dan Angelina Jolie, yang telah mengunjungi dan membagikan bantuan ke kamp pengungsi.

3. Bono, yang telah pergi ke beberapa negara termiskin di Afrika dan memimpin dalam melobi untuk mendapatkan bantuan utang dari negara-negara yang kurang maju.
4. Neil Young, Bob Dylan, dan John Lennon, yang memprotes melalui lagu-lagu mereka di tahun 1960-an.

Dengan melibatkan para selebriti dalam diplomasi, emosi, etika, dan retorika akan terbentuk urusan-urusan internasional karena mereka menjadi alat tawar-menawar, tetapi akan tetap berada di urutan kedua dalam wacana realis mengenai kompleksitas sistem global state (Wheeler 2016: 531). Diplomasi selebriti merupakan suatu bentuk lain dari hak pilihan yang di dalamnya permulaan mengisi kekosongan dalam kepercayaan publik yang diabaikan oleh kelas politik internasional (Cooper: 2008). Definisi yang ada tentang diplomasi selebritis ini terbukti berbeda dengan tradisi Westphalian karena hal ini mengutamakan keamanan negara dan kekuasaan yang sulit.

Dengan adanya PBB yang menetapkan para duta UNICEF dan komisi tinggi PBB untuk pengungsi (UNHCR), kehadiran para selebriti telah diketahui dan dimanfaatkan secara internasional, karena program ini bertujuan untuk membantu memfokuskan perhatian global pada tujuan mulia PBB dan meningkatkan misi PBB untuk universalisme (Huliaras dan Tzifakis 2010: 260). Penyebaran duta besar kebaikan oleh PBB merupakan hal yang elitis dan etho-sentris, dan program ini hanya mengarah pada devaluasi mendasar dari prinsip PBB (Wheeler 2011: 7) terlepas dari hal ini kasus PBB sekarang memperlihatkan

bagaimana para selebriti dapat memanfaatkan ketenaran dan status mereka yang merupakan bagian dari budaya politik modern untuk menggerakkan opini publik guna melakukan reformasi diplomatik (Cooper 2008).

Dengan kata lain hal ini mencerminkan perubahan sosial, politik, dan internasional dalam praktek diplomatik. Diplomasi selebriti memang sah dalam haknya sendiri karena, yang terpenting adalah ketika mereka berhasil, pesan-pesan mereka tersampaikan pada lawan bicara yang mereka tuju. Mereka diakreditasi sebagai memiliki kedudukan dan legitimasi oleh mitra yang mereka cari untuk bernegosiasi. Mereka terlibat dalam inti diplomatik fungsi representasi dan komunikasi. Dengan begitu mereka memainkan peran yang besar dalam menengahi kerenggangan antara aktor satu dengan aktor lainnya (Pigman 2010).

Akan tetapi, dengan diplomasi selebriti, masalah dan advokasi mungkin disederhanakan, karena para selebriti menyediakan pesan yang mudah dipahami dan secara moral yang biasanya melalui slogan (Dieter dan Kumar 2008: 260-261).

Biasanya, riset tentang diplomasi selebriti memanfaatkan studi kasus dalam menganalisis dan mempelajari para selebriti yang terlibat. Huliara dan Tzifakis (2010) mempelajari kasus mengenai partisipasi putri Diana dalam kampanye untuk melarang ranjau darat anti-personil, yang menggunakan foto dan cerita sebagai data, dan aktivisme Mia Farrow sehubungan dengan kebijakan cina terhadap Sudan. Engle (2012) telah menyelesaikan studi kasus tentang para selebriti yang terlibat dan strategi yang digunakan untuk mempromosikan aksi

PBB melawan kekerasan seksual. Demikian pula, Kogen (2014) telah melakukan studi kasus mengenai Angelina Jolie, George Clooney, dan Bono, serta melalui analisis kongregasi penting mengenai wawancara televisi mereka, dia mempelajari perbedaan dalam metode mereka dalam membicarakan advokasi mereka, dan persamaan dan perbedaan wacana, yang berada dalam konteks riset diplomasi selebritis sebelumnya.

Menyimpang dari studi kasus, studi oleh Choi dan Berger pada tahun 2010 menggunakan survei, wawancara dengan psikolog, dan menganalisis sirkulasi media cetak. Demikian pula, Brockington (2014) mewawancarai pengembangan, media, dan para profesional selebriti di Inggris. Yang lebih berfokus pada bagaimana media sosial digunakan dalam komunikasi politik antara aktor negara dan non-negara, Stieglitz dan Dan-Xuan, pada tahun 2012, mempelajari tweet terkait dengan unsur dan postingan di Facebook.

Oleh karena itu, diplomasi selebritis berfokus pada para aktor non-negara dan bentuk diplomasinya yang sebagaimana para selebriti meningkatkan kewaspadaan terhadap hal-hal tertentu (biasanya kemanusiaan), biasanya yang dipromosikan oleh IGOs, seperti PBB, dan LSM. Akan tetapi, dalam penelitian yang sudah ada tentang diplomasi selebriti, banyak hal telah difokuskan kepada para selebriti yang datang dari barat, seperti yang telah dibahas sebelumnya. Meskipun demikian, hal ini menetapkan model diplomasi selebriti yang membuktikan bahwa penghalang struktural seperti bahasa dan akses pada hiburan dan mesin publisitas mengalahkan kuasa lembaga selebriti (Cooper, Dobson, dan Wheeler 2017: 313).

2.1.6 Konvensi Hak Anak (Convention on The Rights of The Child)

Gagasan tentang hak anak berawal sejak berakhirnya Perang Dunia I sebagai reaksi atas penderitaan yang timbul akibat dari bencana peperangan terutama yang dialami oleh kaum perempuan dan anak-anak. PBB saat itu bergerak karena besarnya jumlah anak yang menjadi yatim piatu akibat perang dunia I. Ide Hak Anak tersebut bermula dari gerakan para aktivis perempuan yang melakukan protes dan meminta perhatian publik atas nasib anak-anak yang menjadi korban perang pada saat itu.

Seorang aktivis yang bernama Eglantyne Jebb (pendiri Save the Children) kemudian mengembangkan sepuluh butir pernyataan tentang hak anak atau rancangan deklarasi hak anak (Declaration of The Rights of The Child) yang pada tahun 1923 diadopsi oleh lembaga Save The Children Fund International Union. Kemudian pada tahun 1924 untuk pertama kalinya Deklarasi Hak Anak diadopsi secara Internasional oleh PBB. Deklarasi ini dikenal juga sebagai Deklarasi Jenewa.

Setelah berakhirnya Perang Dunia ke-II yaitu pada tahun 1948, Majelis Umum PBB kemudian mengadopsi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada tanggal 10 Desember. Peristiwa tersebut kemudian diperingati setiap tahunnya sebagai Hari Hak Asasi Manusia se-dunia, menandai perkembangan penting dalam sejarah HAM dan beberapa hal yang menyangkut hak khusus bagi anak-anak dalam deklarasi tersebut.

Pada tahun 1959 Majelis Umum PBB kembali mengeluarkan Pernyataan tentang Hak Anak yang merupakan deklarasi internasional kedua bagi hak anak. Tahun 1979 saat dicanangkannya Tahun Anak Internasional, Pemerintah Polandia mengajukan usul bagi perumusan suatu dokumen yang meletakkan standar internasional bagi pengakuan terhadap hak-hak anak dan mengikat secara yuridis. Inilah awal perumusan Konvensi Hak Anak.

Konvensi Hak Anak (Convention on The Rights of The Child) telah disahkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 November 1989, dan mulai mempunyai kekuatan memaksa (entered in force) pada tanggal 2 September 1990. Konvensi hak anak ini merupakan instrumen yang merumuskan prinsip-prinsip yang universal dan norma hukum mengenai kedudukan anak. Oleh karena itu, konvensi hak anak ini merupakan perjanjian internasional mengenai hak asasi manusia yang memasukkan hak sipil, hak politik, hak ekonomi dan hak budaya. Konvensi ini telah diratifikasi oleh semua negara di dunia, kecuali Somalia dan Amerika Serikat (Darwan Prinst, S.H., 2003:103-119).

2.2 Kerangka Pemikiran

Hubungan Internasional adalah hubungan antar individu (actor negara) atau antar negara yang dimana masing-masing negara memiliki kepentingan yang ingin dicapai bersama-sama. Setiap negara tidak bisa lepas dari hubungan internasional karena setiap negara memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing, sehingga hubungan internasional akan melengkapi kekurangan

tersebut. Hubungan Internasional tidak hanya bermula dari suatu kerjasama, melainkan bisa bermula dari persengketaan, permusuhan, persahabatan, ataupun peperangan juga termasuk dalam hubungan internasional.

Pada awalnya Konvensi Hak Anak dibentuk untuk melindungi para korban perang dunia ke I dan II, yang dimana banyak anak-anak menjadi korban hingga ada yang berakhir menjadi yatim piatu. Konvensi hak anak ini adalah instrumen yang merumuskan prinsip-prinsip yang membuatnya menjadi isu universal dan norma hukum mengenai kedudukan anak. Oleh karena itu, konvensi hak anak ini merupakan perjanjian internasional mengenai hak asasi manusia yang memasukkan hak sipil, hak politik, hak ekonomi dan hak budaya.

Kerjasama Internasional merupakan salah satu dari bentuk interaksi antar aktor hubungan internasional dimana didalamnya terdapat kepentingan masing-masing negara atau bisa dikatakan juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Kerjasama Internasional meliputi kerjasama di bidang politik, social, pertahanan, keamanan, kebudayaan, dan ekonomi, berpedoman pada politik luar negeri masing-masing. Grup BTS menjalin kemitraan secara resmi dengan Komite Korea untuk UNICEF pada 1 November 2017. Isi kerjasamanya ialah Group BTS membentuk kampanye bernama *Love Myself* untuk mensponsori kampanye *#EndViolence* milik UNICEF. Setiap tahunnya BTS menyumbangkan dana pada UNICEF sejak tahun 2017. BTS telah mendonasikan uang sebesar 2,98 Juta USD. Dana bantuan dari Group BTS sangat membantu UNICEF dalam misinya mengakhiri kekerasan terhadap anak dan remaja.

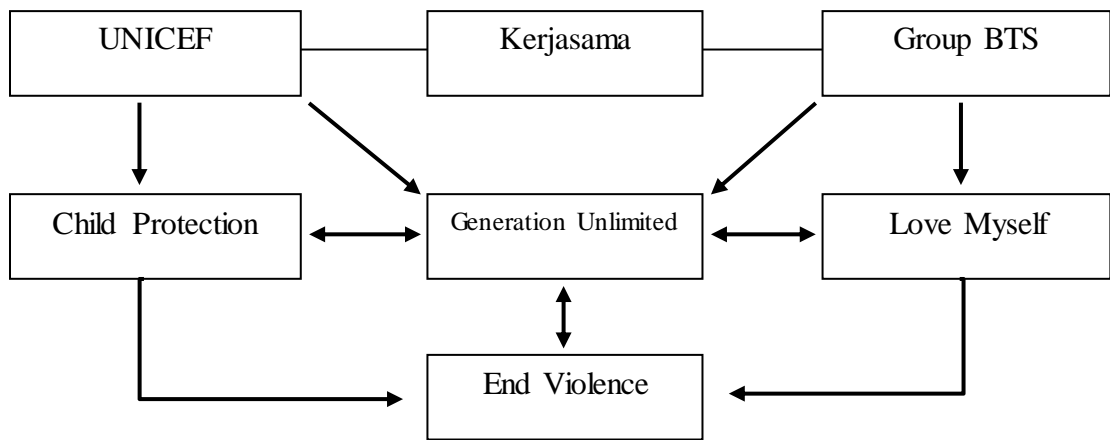
Perbedaan propaganda dan soft power dibentuk dikarenakan negara tidak selalu melibatkan diri dalam penggunaan budaya sebagai soft power, tetapi lebih banyak digunakan sebagai sarana untuk propaganda yang dapat melawan karakteristik soft power. Korea Selatan adalah negara yang telah terlibat dalam produksi dan penyebaran budaya populer. Pemerintah bahkan menggunakan *Hallyu* sebagai soft power yang akan fokus pada cap nasional dan ekspor budaya, yang pada akhirnya akan membangun dirinya dan memperkuat posisinya di dunia.

Korea Selatan melihat ini sebagai kesempatan untuk mengatasi budaya mereka yang tersisihkan, jika sudah teratasi, produk budaya Korea akan menjadi lebih menarik bagi orang asing. Dalam semua strategi yang berkaitan dengan ekspansi jangkauan *Hallyu*, pemerintah Korea memberikan jalan bagi grup BTS untuk menjadi duta untuk UNICEF pada program yang bernama *Generation Unlimited*, hal tersebut bisa terjadi karena Group BTS memiliki pengaruh yang kuat, harapan dan pengaruh positif yang diberikan kepada dunia, hal tersebut mendukung untuk mensukseskan kampanye *#EndViolence* serta program *Generation Unlimited*. Dengan bantuan Group BTS, *Generation Unlimited* menjadi pendekatan inovatif dalam memperluas dukungan sosialnya terhadap generasi muda yang bernasib kurang baik dalam transisi dari masa remaja ke dewasa. Bisa dikatakan Group BTS akan membuka jalan lebih lebar lagi agar masyarakat Internasional lebih memperhatikan isu kekerasan yang terjadi pada anak-anak dan remaja.

Diplomasi selebriti telah diartikan sebagai pekerjaan dari individu atau suatu kelompok yang terkenal, sehingga mereka bisa mempublikasikan tujuan

internasional dan terlibat dalam pengambilan keputusan kebijakan luar negeri yang biasanya diurus oleh aktor negara. Para selebriti telah menjadi aktor penting dalam diskusi tentang pembangunan dengan mempublikasikan suatu kampanye, selebriti dapat mempengaruhi opini publik dan ikut campur dalam urusan diplomatic.

Pada sidang umum PBB ke-73 di California, BTS diundang untuk datang sebagai pembicara pada sidang tersebut. Sebagai aktor non-negara, kehadiran BTS pada saat itu menjadi sejarah dunia internasional. Pasalnya Sidang Umum PBB itu sendiri merupakan sidang formil yang selama ini hanya dihadiri oleh aktor negara atau utusan diplomatik suatu negara. Kehadiran BTS sebagai pembicara tentu berkaitan dengan peluncuran program *Generation Unlimited* pada saat itu. Pidato singkat yang disampaikan oleh BTS juga menjelaskan bahwa program *Generation Unlimited* akan menaruh perhatian khusus pada: meng-advokasi tindakan kekerasan terhadap pemuda, bantuan mengatasi kesulitan dalam fase remaja, penanganan krisis pendidikan, pelatihan, kesehatan, dan lapangan pekerjaan untuk para pemuda. BTS dianggap merepresentasikan secara simbolis pada pemuda yang ada diseluruh dunia (*Representative of Global Youth*) itu karena BTS menyampaikan komitmennya untuk bertanggung jawab dan berperan dalam masa depan anak-anak muda lainnya diseluruh dunia. Maka dari itu program *Generation Unlimited* menekankan tema milik *Love Yourself* sebagai petisi bagi anak-anak muda.



Gambar 2.2 Bagan Kerangka Pemikiran

Sumber : Diolah oleh Peneliti